

DESKRIPSI PERKEMBANGAN LEMBAGA PERKREDITAN DI PEDESAAN JAWA TIMUR

Oleh:

Benny Rachman*)

Abstrak

Deregulasi bank telah berhasil meningkatkan jumlah lembaga perbankan, namun peningkatan jumlah lembaga tersebut belum mampu meningkatkan proporsi kredit pada sektor pertanian. Jumlah kredit untuk sektor pertanian relatif tetap yaitu sekitar 8 persen dari seluruh kredit yang tersalur. Disisi lain perkembangan pinjaman, simpanan masyarakat serta nisbah pinjaman terhadap masyarakat pada BRI Udes, LDKP dan Bank pasar dalam kurun waktu terakhir menunjukkan adanya gejala bahwa arus dana dari pedesaan lebih besar daripada kredit yang mengalir ke pedesaan. Sementara itu dilihat dari segi penyebaran Bank Perkreditan Rakyat (BPR) belum sepenuhnya menyentuh daerah pedesaan, demikian pula dari aspek pengumpulan serta penyaluran melalui kredit tampak peranan BPR masih relatif kecil bila dibandingkan dengan lembaga perkreditan lainnya.

LATAR BELAKANG

Keberhasilan pembangunan pertanian tidak terlepas dari peran program perkreditan yang merupakan salah satu unsur pelancar dalam program pembangunan sektor pertanian. Pada dekade enam puluhan, pengenalan teknologi pertanian melalui penyuluhan pertanian yang terhimpun dalam suatu program kredit paket Bimas tercakup pula pemberian kredit dalam paket intensifikasi yang dimaksudkan agar petani mampu membeli sarana produksi pertanian yang dianjurkan. Demikian pula kehadiran BRI-Udes di awal tujuh-puluhan merupakan perangkat yang disajikan untuk menunjang program Bimas Nasional yang disempurnakan.

Penyuluhan pertanian juga telah berhasil mengubah pola pikir petani tradisional menjadi petani yang responsif terhadap teknologi baru serta berorientasi pasar. Upaya yang dirintis saat itu agaknya cukup membuahkan hasil yang nyata dengan tercapainya swasembada beras tahun 1984. Keberhasilan program tersebut, terkait erat dengan usaha penemuan teknologi baru, kebijakan harga yang mampu merangsang untuk berproduksi, penyediaan sarana produksi yang relatif murah, perbaikan transportasi dan komunikasi serta tersedianya kredit program yang memadai. Semua unsur-unsur diatas merupakan determinan keberhasilan pembangunan pertanian.

Keberhasilan ini pula telah mampu meningkatkan permodalan petani. Sebagai gambaran, adanya

gejala peningkatan Simpedes di pedesaan yang relatif pesat, agaknya cukup mencerminkan adanya pemupukan modal di pedesaan. Fakta lain juga menunjukkan semakin berkembangnya jumlah Lembaga Perbankan yang menjangkau pedesaan. Namun, dengan semakin meningkatnya jumlah Lembaga Perbankan yang menyentuh pedesaan, perlu pula diamati pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi pedesaan.

Dengan kaitan di atas, tulisan ini mencoba untuk mempelajari pengaruh deregulasi perbankan terhadap perkembangan perkreditan pedesaan, yang secara spesifik diarahkan untuk mengkaji: (1) pengaruh kebijakan deregulasi bank terhadap penyebaran lembaga perkreditan yang menjangkau pedesaan, (2) pengaruh kebijakan deregulasi bank terhadap arus dana dari dan ke pedesaan.

KERANGKA PEMIKIRAN

Selama dekade delapan-puluhan telah dua kali dikeluarkan kebijakan deregulasi perbankan, pertama pada tahun 1983 dan kedua kebijakan Oktober 1988. Deregulasi perbankan tersebut antara

*) Staf peneliti Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian, Bogor.

lain bertujuan untuk mengefektifkan kebijakan moneter dalam pengendalian perekonomian, deregulasi perbankan tahun 1983 antara lain memberikan kebebasan pada bank untuk menentukan sendiri tingkat lembaga kredit.

Kebijakan Oktober 1988 diantaranya menyangkut pada diperkenankannya pendirian bank perkreditan rakyat (BPR) sampai di tingkat kecamatan. Kebijakan di atas tentunya mempunyai pengaruh yang besar terhadap perekonomian pedesaan khususnya menyangkut masalah arus modal di pedesaan. Dengan semakin banyaknya lembaga perbankan diharapkan semakin besarnya keterlibatan ekonomi uang di pedesaan dan diharapkan pula kebijakan moneter dapat semakin efektif dalam memacu perekonomian pedesaan.

Lembaga perbankan merupakan salah satu sarana atau media arus modal dari dan untuk masyarakat. Meskipun saat ini sudah ada bursa modal tetapi jangkauan bursa modal ini masih diperuntukkan bagi masyarakat kota-kota besar. Oleh karena itu lembaga perbankan merupakan lembaga formal yang banyak mengatur arus modal dari dan untuk masyarakat pedesaan.

Munculnya Simpedes tidak dapat dipisahkan dengan deregulasi bank tahun 1983. Sejak kehadirannya di pedesaan jumlah penabung dan jumlah tabungan Simpedes meningkat relatif pesat. Iklan Simpedes yang dilengkapi dengan berbagai macam hadiah uang yang relatif besar telah menarik nasabah Simpedes.

Dengan dikeluarkannya kebijakan deregulasi bank 27 Oktober 1988 telah mengakibatkan munculnya bank-bank perkreditan rakyat di tingkat kecamatan. Semakin banyaknya lembaga perbankan sampai di tingkat kecamatan yang sejalan dengan semakin dalamnya keterlibatan ekonomi uang di pedesaan sangat dimungkinkan oleh kebijakan moneter yang semakin efektif.

Jumlah lembaga perbankan yang semakin banyak dapat memberi dampak positif maupun negatif terhadap perkembangan perekonomian pedesaan. Meningkatnya penyaluran kredit untuk kegiatan produksi akan berpengaruh positif terhadap perekonomian di pedesaan. Sebaliknya kegiatan menabung yang semakin besar dapat menghambat pertumbuhan ekonomi pedesaan. Hal ini mudah dimengerti karena dengan kondisi tersebut secara relatif akan berpengaruh terhadap tingkat konsumsi, serta kurangnya minat berinvestasi dalam kegiatan produktif, yang mana diduga aspek-aspek tersebut akan mempengaruhi akselerasi perekonomian setempat.

SUMBER DAN MACAM DATA

Data yang dihimpun meliputi, perkembangan dan penyebaran lembaga, diantaranya; perkembangan jumlah bank, perkembangan BRI-Udes, BPR, KUD serta aktivitas ekonomi seperti; perkembangan kredit menurut sektor dan perkembangan kredit BRI-Udes. Sedangkan sumber data diperoleh dari berbagai instansi berikut; Perwakilan Bank Indonesia, Jawa Timur; Bappeda; Kanwil Koperasi serta Kantor Statistik.

GAMBARAN PERBANKAN DAN PERKREDITAN NASIONAL

Patut diakui bahwa sejak deregulasi khususnya deregulasi Pakto, sektor perbankan meningkat dengan pesat. Sumitro Djojohadikusumo (Info Bank, 1990), mengemukakan bahwa perkembangan sektor perbankan di dalam struktur pembentukan Produk Domestik Bruto pada tahun 1989 melaju dengan tingkat pertumbuhan 12,8 persen. Angka ini jauh lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya, yang tumbuh sekitar 2,8 persen. Tingkat pertumbuhan setinggi ini sebenarnya tidaklah mengherankan, karena justru dalam tahap yang disebut "early growth", tingkat pertumbuhan yang tinggi memang lebih dimungkinkan. Namun dibalik pertumbuhan tersebut, disadari bahwa perubahan yang mendasar dan bermakna telah terjadi pada sektor perbankan serta sektor-sektor ekonomi dewasa ini.

Perkembangan jumlah kredit sejak adanya deregulasi bank, menunjukkan bahwa proporsi kredit ke sektor pertanian tidak banyak berubah dalam kurun waktu selama 6 tahun (Tabel 1). Namun dari segi pertumbuhannya nampak adanya peningkatan dengan rata-rata sekitar 21 persen. Peningkatan pertumbuhan ini agaknya diikuti pula oleh sektor-sektor lainnya seperti, sektor industri, perdagangan dan jasa serta sektor lainnya dengan tingkat pertumbuhan berkisar antara 20 persen hingga 39 persen dari kredit yang tersalur.

Sebaliknya peningkatan pertumbuhan kredit dari beberapa sektor ekonomi tersebut tidak diiringi dengan meningkatnya sektor pertambangan. Untuk sektor ini terlihat bahwa baik dari segi nominal maupun dari segi persentase pertumbuhannya menunjukkan kecenderungan yang terus menurun.

Menurunnya pertumbuhan dari kredit yang tersalur untuk sektor pertambangan agaknya lebih dimungkinkan oleh tersalurnya kredit untuk sektor-sektor ekonomi lainnya seperti sektor pertanian dan

Tabel 1. Perkembangan jumlah kredit dan persentase yang tersalur menurut sektor tahun 1982 - 1987 di Indonesia (milyar rupiah)¹⁾.

Sektor	Jumlah kredit yang tersalur						Pertumbuhan (%)
	1982	1983	1984	1985	1986	1987	
Pertanian	1.025 (7,9)	1.226 (8,0)	1.318 (7,0)	1.656 (7,5)	2.097 (7,9)	2.656 (8,1)	20,9
Pertambangan	1.472 (11,3)	806 (5,3)	381 (2,0)	258 (1,2)	394 (1,5)	385 (1,2)	-23,5
Perindustrian	3.923 (30,1)	5.207 (34,0)	6.667 (35,4)	7.592 (34,3)	8.537 (32,3)	10.917 (33,2)	22,7
Perdagangan	4.129 (31,7)	5.132 (33,5)	6.344 (33,7)	7.255 (32,7)	8.399 (31,8)	10.864 (30,6)	19,5
Jasa	1.867 (14,3)	2.277 (14,9)	3.169 (16,8)	4.183 (18,9)	4.813 (18,2)	5.460 (16,6)	23,9
Lainnya	606 (4,7)	651 (4,3)	931 (4,9)	1.213 (5,5)	2.162 (8,2)	3.187 (9,7)	39,4
Jumlah	13.022 (100)	15.299 (100)	18.813 (100)	22.157 (100)	26.402 (100)	32.852 (100)	20,3

Keterangan: - ¹⁾ Keadaan per Desember setiap tahun.

- Angka dalam kurung adalah persentase.

Sumber: Biro Pusat Statistik, 1988.

industri yang cenderung mendapat prioritas dalam perolehan kredit.

Sejalan dengan menurunnya peranan sektor pertambangan secara nasional diikuti pula dengan mengecilnya sumbangan terhadap PDRB di Jawa Timur yang hanya 0,42 persen. Sedangkan dari segi perkembangan jumlah kredit yang tersalur terlihat gambaran yang hampir serupa, yaitu terdapatnya kecenderungan yang kurang menggembirakan untuk wilayah Jawa Timur. Apabila diamati lebih lanjut ternyata hampir seluruh sektor ekonomi kecuali sektor lainnya di provinsi Jawa Timur memperlihatkan warna yang sama dengan sektor pertambangan yaitu adanya kecenderungan yang terus merosot dari segi kredit yang tersalur, terutama dalam periode 1982 hingga 1987. Namun untuk tahun 1988, khususnya sektor pertanian menunjukkan adanya peningkatan. Kecenderungan meningkatnya kredit untuk sektor pertanian ini agaknya dapat dipahami mengingat banyaknya program-program pemerintah yang harus dilaksanakan untuk meningkatkan produksi pertanian (Tabel 2). Dengan demikian, dampak penerapan kebijakan pemerintah di sektor ini menyebabkan semakin besarnya perolehan kredit disektor lain. Di lain pihak berkurangnya perolehan kredit pada sektor ekonomi seperti, pertambangan, perdagangan dan jasa, mungkin dikarenakan telah memadai-

nya atau membaiknya modal yang dimiliki oleh masing-masing sektor sehingga suntikan kredit dari pemerintah relatif berkurang.

Sementara itu diperkirakan pasar perbankan dalam dekade mendatang akan lebih ketat dalam persaingan merebut dana masyarakat. Memang semakin banyak masyarakat beranggapan bahwa pelayanan perbankan relatif cukup baik. Hal ini tercermin dari besarnya dana masyarakat yang di-himpun dan banyaknya pinjaman yang diberikan serta semakin meningkatnya keterampilan tenaga perbankan yang diterapkan di beberapa bank menunjukkan bahwa perbankan sudah mulai menapak ke tangga kedewasaan.

Selain itu melalui Pakjan, Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI) yang selama ini banyak dinikmati perbankan telah ditarik kembali. Menurut Info Bank (April 1990), ada sekitar Rp.2 trilyun kelebihan likuiditas yang terjadi di bank-bank saat ini, sehingga kalau KLBI dicabut, semestinya kejutan dalam pencintan moneter tidak akan terjadi dan yang pasti tekanan inflasi menjadi agak berkurang.

Bagaimanapun untuk dapat mempertahankan momentum pertumbuhan, memang diperlukan faktor-faktor dasar yang mendukung, salah satunya adalah berkembangnya usaha-usaha kecil dan menengah sebagai dasar dari kegiatan usaha-usaha

Tabel 2. Perkembangan jumlah kredit yang tersalur menurut sektor-sektor ekonomi tahun 1982 - 1988 di Jawa Timur.

Sektor	Jumlah kredit yang tersalur (milyar Rp) ¹⁾							Pertumbuhan ¹⁾ (%)
	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	
Pertanian	208 (12,6)	294 (31,7)	232 (19,7)	314 (22,5)	339 (19,0)	357 (26,2)	477 (25,7)	21,5
Pertambangan	0,690 (0,1)	0,450 (0,05)	0,500 (0,04)	0,217 (0,01)	0,347 (0,02)	0,483 (0,03)	0,771 (0,04)	1,9
Perdagangan	436 (26,4)	487 (52,4)	622 (53,4)	628 (45,0)	797 (44,9)	105 (7,7)	156 (8,3)	-29,9
Jasa	899 (54,5)	146 (15,7)	200 (17,0)	304 (21,7)	162 (9,0)	250 (18,0)	304 (16,2)	32,6
Lainnya	107 (6,4)	0,911 (0,15)	111 (9,5)	147 (10,7)	475 (26,9)	651 (47,8)	910 (49,4)	125,0

Sumber: ¹⁾ Bank Indonesia (1989). Statistik Perbankan Jawa Timur.
Angka dalam tanda () adalah persentase.

yang lebih besar. Bila salah satu atau sebagian dari pranata ekonomi itu tidak lancar secara ekonomi, maka dapat diperkirakan dampaknya akan "counter-productive" terhadap apa yang sudah diperoleh saat ini.

Upaya memanfaatkan peluang dari berbagai kebijakan di bidang deregulasi perbankan tengah dilakukan baik oleh bank pemerintah maupun bank swasta dalam rangka menghimpun dana masyarakat. Dana yang dihimpun dari masyarakat disalurkan dalam berbagai bentuk seperti, Giro, Deposito dan Tabungan.

Dari segi penumpukan dana masyarakat, jumlah terbesar yang dihimpun pada tahun 1987 adalah dalam bentuk Deposito, baik untuk bank pemerintah maupun swasta yaitu tercatat masing-masing sebesar Rp.10042,6 milyar dan Rp.6367,0 milyar sedangkan posisi kedua berupa Giro. Apabila dilihat dari segi perkembangannya ternyata porsi terbesar pada tahun 1982 berupa Giro, yaitu sebesar Rp.4028,5 milyar untuk Bank Pemerintah dan Rp.1367,4 milyar untuk Bank swasta pada tahun 1982. Namun sejak tahun 1983 terjadi pergeseran bentuk tabungan yang berkesinambungan dengan menempatkan deposito sebagai porsi utama (Tabel 3).

Info Bank (1990) mengungkapkan bahwa bagi kelompok bank pemerintah pertumbuhan aset, dana masyarakat dan kredit dalam tahun 1989 masing-masing adalah 27,10 persen, 33,42 persen dan 22,67 persen. Sedangkan untuk kelompok bank swasta mengalami pertumbuhan aset yang cukup

pesat yaitu 114,2 persen. Dana masyarakat yang dihimpun dan kredit yang disalurkan tumbuh sangat mengesankan masing-masing sebesar 11,8 persen dan 102,3 persen.

Perkembangan perbankan ini agaknya membawa pengaruh di luar perbankan itu sendiri. Dalam lingkungan perbankan itu sendiri terjadi persaingan yang semakin tajam melalui adanya perbaikan tingkat efisiensi, munculnya produk-produk baru jasa perbankan serta semakin luasnya jaringan perbankan di seluruh wilayah Indonesia yang pada gilirannya membawa pada besarnya upaya pengerahan dana masyarakat. Selain itu diungkapkan pula keterkaitannya dengan perkembangan ekonomi secara umum, yaitu dengan tingkat pertumbuhan ekonomi nasional yang diperkirakan 6,2 persen dan tingkat inflasi sebesar 5,97 persen dalam tahun 1989. Hal ini merupakan faktor-faktor penting yang saling terkait dengan perkembangan yang terjadi. Faktor lain berupa terjadinya depresiasi rupiah sebesar 4 persen dalam tahun 1989 serta tingkat suku bunga yang cenderung menurun baik bunga deposito maupun kredit, semuanya turut mendorong usaha perbankan secara positif.

PERKEMBANGAN LEMBAGA PERKREDITAN PEDESAAN

Sebagai wilayah agraris dimana sebagian besar masyarakat Indonesia berada dan menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian, maka kehadiran

Tabel 3. Perkembangan dana masyarakat yang dihimpun melalui perbankan dalam bentuk giro, deposito dan tabungan tahun 1982 sampai 1987 di Indonesia.

Uraian	Jumlah uang yang disimpan ¹⁾ (milyar Rp)					
	1982	1983	1984	1985	1986	1987
Bank Pemerintah	6.168,4	8.338,1	10.034,8	13.916,0	15.193,0	16.835,3
– Giro	4.028,5	4.260,8	4.995,9	5.132,9	5.330,1	5.308,9
– Deposito	1.718,2	3.631,2	4.405,2	7.150,7	8.741,5	10.042,6
– Tabungan	421,7	489,4	633,7	832,4	1.121,4	1.483,8
Bank Swasta	2.698,9	4.015,1	5.463,4	7.258,4	8.317,9	9.883,6
– Giro	1.367,4	1.770,0	1.969,7	2.494,6	2.826,5	3.198,9
– Deposito	1.263,4	2.150,6	3.373,7	4.575,9	5.226,0	6.367,0
– Tabungan	68,1	94,5	120,0	187,9	265,6	318,4
Total	8.867,3	12.396,5	15.498,2	21.174,4	23.510,9	26.718,9
– Giro	5.395,9	6.030,8	6.965,6	8.427,5	8.156,6	8.507,1
– Deposito	2.981,6	5.781,8	7.778,9	11.726,6	13.967,5	16.409,6
– Tabungan	489,0	583,9	753,7	1.020,3	1.802,2	1.802,2

Keterangan: ¹⁾ Keadaan tabungan per Desember setiap tahun.

Sumber: Biro Pusat Statistik.

lembaga perkreditan di pedesaan sangatlah diharapkan untuk dapat menggerakkan kegiatan ekonomi desa yang pada gilirannya dapat meningkatkan pendapatan petani secara menyeluruh.

Munculnya kredit pedesaan ini paling tidak dilatar belakangi oleh tiga faktor utama yaitu pertama, luasnya daerah yang bisa dikategorikan desa dengan potensi ekonomi yang terletak pada sumber-sumber alam dan jumlah tenaga kerja yang jauh lebih besar daripada di kota; kedua, besarnya jumlah penduduk Indonesia yang tinggal dan mencari nafkah di desa disamping jumlah pengangguran baik nyata maupun yang terselubung dengan penghasilan dan produktivitas yang sangat rendah, dan ketiga, pengaruh terhadap laju pertumbuhan ekonomi desa, sehingga akan membawa keseimbangan di dalam proses ekonomi nasional dalam upaya menjangkau kestabilan ekonomi, sosial dan politik nasional.

Sedangkan dari segi perkembangan lembaga perkreditan pedesaan, secara rata-rata terlihat bahwa dalam periode 1982 – 1987, kredit pertanian hanya sekitar 7,7 persen dari jumlah kredit yang dialokasikan secara nasional pada periode tersebut (Tabel 1). Kenyataan ini memberi petunjuk bahwa paket deregulasi dalam perkreditan di pedesaan masih perlu disempurnakan demi memenuhi kebutuhan masyarakat desa.

Sebagai gambaran, paket Oktober 1988, yang cukup memberi peluang pengerahan dana dan pemasyarakatan kredit melalui berbagai kemudahan pendirian Bank perkreditan rakyat di kota-kota kecamatan, serta Pakjan (1990), yang menghentikan kredit-kredit murah dan sebagai kompensasinya menganjurkan bank-bank untuk mengalokasikan 20 persen dari total kredit kepada bisnis kecil juga perlu dipelajari dampaknya terhadap perkembangan kredit pedesaan.

Dalam kaitan itu pula bahasan dalam bagian ini akan diarahkan untuk melihat sejauh mana perkembangan volume usaha lembaga-lembaga perkreditan pedesaan seperti, Koperasi Unit Desa (KUD), Bank Perkreditan Rakyat (BPR) serta BRI-Udes.

LEMBAGA KOPERASI UNIT DESA (KUD)

Ukuran yang umum digunakan dalam mengungkapkan perkembangan perkoperasian adalah segi jumlahnya. Dari segi ini, perkembangan koperasi nasional sejak Pelita I hingga Pelita IV tampak mengesankan, gambarannya dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Perkembangan jumlah lembaga, anggota dan volume usaha koperasi di Indonesia dari Pelita I – Pelita IV.

Periode	Koperasi				Anggota			
	KUD	Pertumbuhan (%)	Non KUD	Pertumbuhan (%)	KUD	Pertumbuhan (%)	Non KUD	Pertumbuhan (%)
Pelita I	2.361	(-)	17.434	(-)	1.264.009	(-)	1.709.546	(-)
Pelita II	4.444	(88,2)	12.986	(- 34,2)	3.116.025	(146,5)	4.493.975	(162,8)
Pelita III	6.373	(43,4)	18.788	(44,6)	9.608.000	(208,3)	4.044.000	(- 11,1)
1984/1985	6.629	(4,0)	19.803	(5,4)	12.008.000	(24,9)	4.394.000	(8,6)
1985/1986	6.979	(5,3)	21.124	(6,7)	14.916.000	(24,2)	5.370.000	(22,2)
1986/1987	7.350	(5,3)	23.096	(9,3)	15.733.000	(5,5)	5.845.000	(8,8)
1987/1988	7.470	(5,3)	23.692	(2,6)	16.682.000	(6,0)	8.863.000	(51,6)

Sumber: Ditjen BLK dan Ditjen Binus Departemen Koperasi dalam M. Nasution (1989).

Dari Tabel 4 diungkapkan bahwa peningkatan jumlah lembaga dan anggota koperasi selama dua dekade tersebut pesat sekali, namun peningkatan ini agaknya belum diimbangi oleh adanya peningkatan mutunya.

Nasution (1989) menilai bahwa permasalahan utama yang menyebabkan mutu koperasi khususnya KUD belum sesuai dengan yang diharapkan antara lain, keanggotaan, kelembagaan, dan pembinaan.

Dari aspek keanggotaan, terlihat kurangnya peran serta anggota dalam aktivitas koperasi. Sementara itu dari sisi pembinaan nampak kurangnya suatu keterpaduan baik antara para pembina maupun antara pembina dan yang dibina.

Kendatipun demikian pemerintah terus berupaya guna meningkatkan mutu gerakan koperasi dalam berbagai aspek yang terkait. Untuk mewujudkan peranan koperasi dalam berbagai aspek tersebut, maka koperasi dituntut harus memiliki kemampuan swadaya dalam arti, mampu dan mempunyai wewenang mengambil keputusan sendiri terutama di bidang organisasi, manajemen dan usaha, yang pada akhirnya menjadi suatu lembaga ekonomi yang mandiri.

Aspek lain berupa jumlah anggota, yang berperan dalam menggerakkan kegiatan rutin koperasi. Pola perkembangan menunjukkan kecenderungan yang meningkat dengan laju 11,86 persen per tahun. Peningkatan sebesar ini memberi petunjuk bahwa paling tidak koperasi agaknya semakin digemari masyarakat, namun tentunya belum berarti sejalan dengan laju peningkatan mutu koperasinya itu sendiri.

Disadari bahwa sebagian besar permodalan KUD tergantung pada bantuan Pemerintah, sehingga berkurangnya arus dana dari pemerintah membawa akibat lemahnya koperasi dari segi permodalannya. Sebagai gambaran diungkapkan data perkembangan usaha KUD dari Pelita III sampai Pelita IV yang sekaligus dapat mencerminkan keadaan sebelum dan sesudah kebijakan moneter. Dari Tabel 5 diperlihatkan bahwa secara keseluruhan modal KUD dalam Pelita IV terjadi penurunan sebesar 8,66 persen bila dibandingkan Pelita sebelumnya. Penurunan ini merupakan akibat berkurangnya modal luar sekitar 38,05 persen. Namun, sebaliknya terdapat peningkatan persentase sebesar 26,58 persen untuk modal sendiri.

Tabel 5. Perkembangan usaha Koperasi Unit Desa (KUD) dari Pelita III – Pelita IV di Indonesia.

Uraian	Pelita III	Pelita IV	Perkembangan	
			Mutlak	%
Volume usaha (Rp juta)	1.003.009	684.428	- 318,581	- 31,76
Modal total (Rp juta)	341.244	311.680	- 29,564	- 8,66
Modal luar (Rp juta)	186.010	115.229	- 70,781	- 38,05
Modal sendiri (Rp juta)	115.234	196.461	41,227	26,58
Sisa hasil usaha	5.940	6.076	136	2,29
Rata-rata jumlah	9,8	6,2	- 3,6	- 36,73
Satuan usaha (unit)				

Sumber: Departemen Koperasi dalam Dampak Deregulasi Perbankan terhadap Kemandirian KUD, (M. Nasution, 1989).

Adanya peningkatan jumlah modal sendiri yang digunakan pada kegiatan usaha koperasi, mendorong koperasi untuk dapat memperoleh SHU yang lebih tinggi dengan perkembangannya sebesar hampir 2,3 persen. Meningkatnya sisa hasil usaha (SHU) ini tidak terlepas dari banyaknya kegiatan usaha non program yang dilakukan koperasi (KUD) yang tentunya hal ini lebih didasarkan atas kemampuan koperasi dan potensi wilayah tempat koperasi itu berada.

LEMBAGA BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR)

Kebijakan deregulasi yang kemudian diikuti oleh Pakto, Pakmar dan Pakjan, merupakan serangkaian kebijakan yang sangat berpengaruh terhadap mobilitas dana di pedesaan. Tumbuhnya lembaga perbankan, BPR, lembaga keuangan di daerah tidak dapat dipisahkan dari serangkaian kebijakan tersebut. Jumlah lembaga perbankan

yang semakin meningkat memungkinkan adanya peningkatan pelayanan terhadap permodalan pedesaan disamping dampak lain yang akan timbul. Demikian pula langkah yang dilakukan BRI Unit Desa tidak dapat dipisahkan dari berbagai kebijakan moneter tersebut. Kehadiran BRI unit desa dimaksudkan untuk menunjang Program Intensifikasi Pertanian. Dengan semakin kurangnya program Bimas maka BRI Udes telah memperluas pelayanannya dengan menghadirkan KUPEDES dan SIMPEDES. Perkembangan Kupedes dan Simpedes ini relatif pesat yang mungkin berkaitan dengan adanya daya tarik melalui pemberian hadiah. Ironisnya perkembangan Simpanan masyarakat pedesaan relatif lebih pesat daripada dana yang tersalur ke pedesaan (Tabel 6). Tercatat pertumbuhan per tahun tertinggi adalah jenis simpanan Simpedes yaitu sekitar 64,3 persen yang kemudian diikuti oleh Tabanas dengan tingkat pertumbuhan 5,2 persen setahun. Sementara itu untuk jenis pinjaman Kupedes menunjukkan peningkatan cukup mengesankan dengan laju 52,0 persen setahun.

Tabel 6. Simpanan masyarakat dan besarnya Kupedes BRI Udes di Jawa dan Bali (milyar Rp), tahun 1987 – 1989.

Uraian	1987	1988	Juni 1989	Pertumbuhan (%/tahun)
1. Simpanan :				
– Tabanas	41.211	46.900	46.900	5,2
– Deposito	5.545	23.144	37.395	–
– Giro	2.907	4.458	2.740	–0,4
– Simpedes	101.278	177.931	213.233	64,3
Jumlah	150.941	252.433	297.877	57,3
2. Pinjaman				
– Kupedes	315.491	389.013	491.364	52,0

Sumber: Marjanto Danusaputro, dkk. Peranan dan Prospek Bank Perkreditan Rakyat. LPPI, 1990.

Tabel 7. Dana masyarakat yang dihimpun oleh BRI Udes pada tahun 1987 sampai 1989 di Jawa Timur.

Jenis tabungan	Tahun 1987		Tahun 1988		Tahun 1989	
	('000 Rp)	%	('000 Rp)	%	('000 Rp)	%
Tabanas	17.746,5	31,0	20.335,1	19,6	19.514,0	15,9
Deposito	2.249,3	3,9	11.653,7	11,2	18.519,7	15,1
Giro	1.466,2	4,4	1.994,8	1,9	1.903,7	1,5
Simpedes	35.791,5	62,5	69.981,5	67,3	83.100,8	67,5
Total	57.253,5	100,0	103.965,1	100,0	123.038,2	100,0

Untuk keadaan di Jawa Timur terlihat pola arus dana masyarakat yang serupa, yakni perkembangan untuk setiap jenis tabungan nampak keragaman. Simpedes agaknya masih menunjukkan dominasinya bahkan terlihat semakin mantap dengan tingkat pertumbuhannya yang menggembirakan yaitu 62,5 persen pada tahun 1987 menjadi 67,5 persen pada tahun 1989. Demikian juga untuk jenis tabungan Deposito menunjukkan pola yang seirama. Terdapatnya peningkatan dari kedua jenis tabungan tersebut nampaknya tidak diikuti oleh jenis tabungan lainnya seperti, Tabanas dan Giro dengan setiap tahunnya terlihat kecenderungan yang terus menurun. Apabila tingkat pertumbuhan tahun 1987 dan tahun 1989 dibandingkan, terlihat jelas penurunan dari jenis tabungan Tabanas dan Giro yang masing-masing hampir 50 persen.

Selanjutnya perkembangan pinjaman, simpanan masyarakat serta nisbah pinjaman terhadap simpanan masyarakat pada BRI Udes, LDKP dan Bank Pasar disajikan dalam Tabel 8. Dari tabel tersebut tampak perkembangan dalam kurun waktu terakhir yang menunjukkan adanya gejala bahwa arus dana dari pedesaan lebih besar daripada kredit yang mengalir ke pedesaan. Dengan menggunakan ukuran nisbah jumlah kredit terhadap jumlah simpanan masyarakat yang dihimpun BRI Udes,

LDKP dan BPR terlihat adanya ragam nisbah tersebut. Demikian pula dari segi pinjaman maupun simpanan masyarakat, ternyata menunjukkan gejala yang kurang menggembirakan khususnya untuk jenis lembaga BP dan LKURK, yang pada kurun waktu 1987 hingga 1989 cenderung menurun tingkat persentase pertumbuhannya. Di pihak lain untuk jenis lembaga BRI Udes tampak mempunyai tingkat pertumbuhan yang mengesankan dengan penambahan untuk simpanan sekitar 8,7 persen sedangkan dari sisi pinjaman tampak meningkat hampir 6,0 persen dalam periode yang sama.

Secara umum data perkembangan nisbah jumlah kredit terhadap simpanan masyarakat pedesaan di Jawa Timur cenderung menurun. Hal ini dapat merupakan suatu petunjuk meningkatnya kemampuan permodalan di pedesaan, khususnya daerah Jawa Timur.

Sementara itu apabila diamati lebih lanjut ternyata arus dana masyarakat yang dihimpun oleh BRI-Udes mencakup lebih 50 persen dari dana total BPR. Peranan LDKP dalam pengerahan dana masyarakat masih jauh ketinggalan dibanding dengan BP dan BRI Udes. Padahal lembaga ini (LDKP) merupakan lembaga yang lebih banyak bergerak pada lapisan masyarakat bawah dan ekonomi lemah baik dalam pengerahan dana maupun dalam penyaluran kreditnya.

Tabel 8. Perkembangan pinjaman, simpanan masyarakat serta nisbah pinjaman terhadap simpanan masyarakat pada BRI Udes, LDKP dan Bank Pasar tahun 1987 – 1989 di Jawa Timur.

Uraian	Desember 1987		Desember 1988		Juni 1989	
	Juta Rp	%	Juta Rp	%	Juta Rp	%
Pinjaman						
– BP	55.069	41,6	59.967	37,3	76.513	35,5
– LKURK	1.354	1,0	705	0,4	2.365	1,1
– BRI-Udes	75.929	57,4	100.359	62,3	136.353	63,4
Sub jumlah	132.352	100	161.031	100	215.231	100
Simpanan ke :						
– BP	52.001	47,4	54.052	34,2	78.374	38,8
– LKURK	434	0,4	187	0,1	503	0,3
– BRI-Udes	57.253	52,2	103.965	65,7	123.039	60,9
Sub jumlah	109.688	100	158.204	100	201.916	100
Nisbah pinjaman terhadap simpanan :						
– BP	1,06		1,11		0,98	
– LKURK	3,12		3,77		4,70	
– BRI-Udes	1,33		0,97	1,11		

Sumber: Marjanto Danusaputro, dkk. Peranan dan Prospek Bank Perkreditan Rakyat. LPPI, 1990.

Selanjutnya apabila dibandingkan jumlah dana yang dipinjamkan terhadap jumlah dana yang dapat dikerahkan oleh lembaga (LDKP), maka terlihat bahwa dana yang dipinjamkan masih lebih besar daripada dana yang dihimpun. Nisbah pinjaman terhadap simpanan pada LDKP di Jawa Timur pada tahun 1989 tercatat sebesar 4,7. Hal ini berarti bahwa dana yang disalurkan lebih besar daripada dana yang dihimpun, sehingga keadaan ini menunjukkan adanya penambahan dana dari luar untuk kegiatan penyaluran kredit pada lembaga tersebut. Berbeda halnya dengan dua lembaga lainnya yaitu BP dan BRI-Udes yang memperlihatkan pola yang relatif seimbang seperti tercermin dari tingkat nisbah terhadap simpanan dari kedua lembaga tersebut yaitu, masing-masing sebesar 0,97 dan 1,11 pada periode yang sama.

Telaahan berikut mencoba mengungkapkan posisi Kupedes menurut sektor ekonomi seperti disajikan dalam Tabel 9 berikut.

Dari tabel tersebut terlihat bahwa jenis kredit yang diberikan oleh lembaga BRI-Udes sebagian besar tersalur pada sektor perdagangan. Sedangkan sektor pertanian menduduki peringkat kedua, dan industri peringkat ke tiga. Hal ini menunjukkan bahwa kesempatan-kesempatan ekonomi di sektor pertanian dan industri di pedesaan masih kurang mendapat perhatian dalam pemberian kredit. Seperti diketahui bahwa kredit pedesaan tidak hanya memberi pinjaman kepada petani tetapi kepada semua kegiatan ekonomi di desa.

Sejak kehadirannya hingga saat ini kredit pedesaan berkembang cukup pesat baik dari segi jumlah maupun jenis program kredit. Dari jumlah lembaga tersebut ada yang hanya menyalurkan kredit kepada nasabah di lokasi terbatas yang umum disebut bank sekunder misalnya, bank perkreditan desa, bank kredit kecamatan, kredit

usaha rakyat kecil (KURK) serta bank-bank pasar. Selain itu ada pula program pinjaman yang disalurkan BRI-Udes dengan ruang lingkup yang tidak lagi lokal, seperti kredit umum pedesaan (Kupedes). Pada dasarnya bentuk kredit ini merupakan pengganti dari kredit mini dan midi pada tahun 1984, karena kedua kredit terakhir ini dianggap tidak efektif. Kemudian menyusul penghapusan KIK dan KMKP sejak awal tahun 1990 yang merupakan salah satu bagian dari kebijakan pemerintah dalam hal perkreditan. Penghapusan kedua bentuk kredit ini disebabkan karena keduanya hanya terbuka bagi golongan petani yang mempunyai tanah cukup luas serta pedagang-pedagang dengan prospek usaha lebih jelas. Pengusaha-pengusaha kecil yang tidak memiliki tanah sebagai jaminan dan prospek usaha yang mudah dilihat dalam jangka setahun agaknya sulit memanfaatkan keduanya. Apabila ditelaah dari sisi perkembangannya, maka nampak bahwa Kupedes untuk semua sektor ekonomi kecuali sektor industri menunjukkan penurunan, sedangkan Kupedes pada sektor industri relatif tetap perkembangannya. Tercatat penurunannya berkisar antara 0 hingga 2 persen dalam periode tahun 1987 hingga 1989.

Sejalan dengan kondisi perkreditan di wilayah Jawa Timur, tampak penyebaran BPR pun agaknya tidak merata baik di kota maupun di desa. Dari Tabel 10 tampak bahwa dari 1497 bank dan lembaga yang terdiri dari BP, BRI-Udes dan Lembaga Dana Kredit Pedesaan (LDKP) yang ada di Jawa Timur pada tahun 1989, sebagian besar yaitu 90,78 persen berada di pedesaan.

Dari BPR yang beroperasi di Jawa Timur, nampaknya LKURK dan BRI-Udes paling banyak bergerak di daerah pedesaan. Kecenderungan kedua lembaga keuangan ini terpusat di pedesaan agaknya cukup beralasan mengingat kehadiran ke-

Tabel 9. Posisi Kupedes menurut sektor ekonomi tahun 1987 – 1989 di Indonesia.

Sektor	1987				1988				1989			
	Org	%	Juta Rp	%	Org	%	Juta Rp	%	Org	%	Juta Rp	%
Pertanian	375.150	28,5	120	27,9	383.929	27,7	148	27,4	397.444	26,7	179	25,9
Industri	23.635	1,8	8	1,9	24.891	1,8	11	2,0	27.194	1,8	13	1,9
Perdagangan	857.366	65,2	288	67,0	874.709	63,1	355	65,8	916.350	61,5	443	64,2
Lain-lain	58.629	4,5	14	3,2	42.436	3,1	13	2,4	49.179	3,3	21	3,1
Penghasilan tetap	0	0	0	0	60.070	4,3	13	2,4	99.544	6,7	34	4,9
J u m l a h	1.314.780	100	430	100	1.386.035	100	540	100	1.489.711	100	690	100

Sumber: Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia, 1990.

Tabel 10. Jumlah BPR perkotaan dan pedesaan tahun 1989 di provinsi Jawa Timur.

Jenis lembaga	Kota	Desa	Jumlah
Bank pasar	34	1	35
Bank desa	1	—	1
LKURK	44	104	148
BRI-Udes	59	1.254	1.313
T o t a l	138	1.359	1.497

Sumber: BPD Jawa Timur.

dua lembaga tersebut memang diperuntukkan bagi masyarakat pedesaan yang berekonomi lemah. Dengan demikian tumbuhnya lembaga-lembaga keuangan di pedesaan akan membawa dampak positif terhadap masyarakat pedesaan, seperti adanya peluang untuk memperoleh modal kerja yang sesuai dengan anggungan yang dimiliki, disamping secara langsung maupun tidak langsung akan memberi tambahan pengetahuan bagi masyarakat pedesaan untuk lebih memahami aspek ekonomi uang dalam bidang usaha.

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Pasar perbankan dalam dekade mendatang akan lebih ketat dalam persaingan merebut dana masyarakat. Hal ini tercermin dari besarnya dana masyarakat yang dapat dihimpun dan banyaknya pinjaman yang diberikan, serta meningkatnya tenaga terampil yang diterapkan di beberapa bank. Ini memperlihatkan bahwa perbankan mulai menapak ke tangga kedewasaan.
2. Untuk menghindari adanya "counter-productive" terhadap perkembangan yang dicapai agaknya diperlukan faktor-faktor dasar yang mendukung, salah satunya adalah dikembangkannya unit-unit usaha kecil dan menengah sebagai basis dari kegiatan usaha-usaha yang lebih besar.
3. Deregulasi bank telah berhasil meningkatkan jumlah kantor bank dan memungkinkan pesatnya pertumbuhan BPR. Namun peningkatan jumlah lembaga tersebut belum mampu meningkatkan proporsi kredit pada sektor pertanian. Jumlah kredit untuk sektor pertanian relatif tetap yaitu sebesar 8 persen dari seluruh kredit yang tersalur. Meskipun demikian ada kecenderungan bahwa masyarakat desa semakin terjangkau oleh pelayanan BRI-Udes.
4. Perkembangan pinjaman dan simpanan masyarakat serta nisbah pinjaman terhadap masyarakat pada BRI-Udes, LDKP dan Bank pasar dalam kurun waktu terakhir menunjukkan gejala lebih besarnya arus dana dari pedesaan daripada kredit yang mengalir ke pedesaan. Sementara itu, dari segi penyebaran, Bank Perkreditan Rakyat (BPR) belum sepenuhnya menyentuh daerah pedesaan. Demikian pula dari aspek pengumpulan serta penyaluran dana melalui kredit, tampak peranan BPR masih relatif kecil bila dibandingkan dengan lembaga perkreditan lainnya.
5. Lahirnya deregulasi di bidang perbankan secara tidak langsung merupakan suatu tantangan sekaligus peluang timbulnya seleksi alamiah terhadap kemampuan lembaga perkreditan. Bagi lembaga yang mampu memanfaatkan kesempatan tentu akan berkembang sejalan dengan perkembangan perekonomian, namun sebaliknya apabila tidak mampu memanfaatkan peluang tersebut, maka keberadaannya akan terancam dan pada akhirnya lembaga tersebut tidak akan mampu bersaing.

DAFTAR PUSTAKA

- BPS, Jakarta. Statistik Indonesia 1982 dan 1988.
- BPD, Jawa Timur (1989). Jumlah BPR perkotaan dan pedesaan di Provinsi Jawa Timur.
- Bank Indonesia (1989). Statistik Perbankan Jawa Timur Marjanto Danusaputro (1990). Peranan dan Prospek. Bank Perkreditan Rakyat. LPPI.
- Bank Indonesia (1989). Statistik Perbankan Jawa Timur. Info Bank (1990). Raja Uang Baru : Bank NU + Muhammadiyah + Bimantara.
- M. Danu Saputro, dkk. (1989). Aspek Manajemen Usaha Koperasi. Prosiding Panel Perkoperasian di Indonesia, Fakultas Peternakan UNDIP.
- Muslimin Nasution (1989). Dampak deregulasi perbankan terhadap Kemandirian KUD. Badan Litbang Koperasi, Departemen Koperasi.